

SKRIPSI

**EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

(Studi Kasus Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

DITA NURFADILLAH
218130093

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2021/2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN BLT
(STUDI KASUS DESA SONDOSIA KECAMATAN BOLO KABUPATEN
BIMA TAHUN 2020)

Oleh:

DITA NURFADILLAH

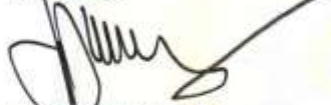
NIM.218130093

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Pada Tanggal 09 Februari 2022

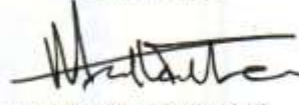
Menyetujui:

Pembimbing I



Deddy Swanto, S.T., M.M
NIDN. 0818087901

Pembimbing II



M. Aprian Jailani, S.AP., MAP
NIDN. 0804049501

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Manajemen Pemerintahan




Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN BLT
(STUDI KASUS DESA SONDOSIA KECAMATAN BOLO KABUPATEN
BIMA TAHUN 2020)

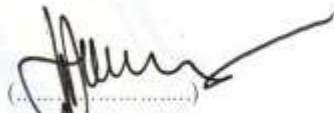
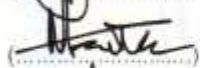

Disusun dan Diajukan Oleh:

DITA NURFADILLAH
218130093

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 4 februari
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

- | | | |
|--|------|--|
| 1. <u>Dedy Iswanto, S.T., M.M</u>
NIDN. 0818087901 | (PU) |  |
| 2. <u>M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP</u>
NIDN. 0804049501 | (PP) |  |
| 3. <u>Drs. Amil, M.M.</u>
NIDN. 0831126204 | (PN) |  |

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN BLT
(STUDI KASUS DESA SONDOSIA KECAMATAN BOLO KABUPATEN
BIMA TAHUN 2020)

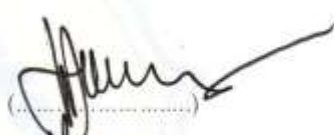


Disusun dan Diajukan Oleh:

DITA NURFADILLAH
218130093

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 4 februari
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

- | | | |
|--|------|--|
| 1. <u>Dedy Iswanto, S.T., M.M</u>
NIDN. 0818087901 | (PU) |  |
| 2. <u>M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP</u>
NIDN. 0804049501 | (PP) |  |
| 3. <u>Drs. Amil, M.M.</u>
NIDN. 0831126204 | (PN) |  |

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dita Nurfadillah

Nim : 218130093

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan nama yang berlaku di perguruan tinggi.



Mataram, 5 Februari 2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Nurfadillah
NIM : 210130093
Tempat/Tgl Lahir : Sondesia, 26 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 082391779595
Email : ditanurfadillah@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) (studi kasus Desa Sondesia Kecamatan Babo Kabupaten Bima Tahun 2020)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. $\frac{100}{100}$

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01 Maret 2022

Penulis



Dita Nurfadillah
NIM 210130093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Nurfadilla
NIM : 218130093
Tempat/Tgl Lahir : Sondosa, 26 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : F. SIPOL
No. Hp/Email : 082391793595 / ditanurfadillah@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah, saya berjudul:

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
(Studi Kasus Desa Sondosa Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 Maret 2022

Penulis



Dita Nurfadillah
NIM. 218130093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ENTHUSIASTIC, OPTIMISTIC AND NEVER GIVE UP”

“SEMANGAT, OPTIMIS DAN PANTANG MENYERAH”

(DITA NURFADILLAH)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Untuk yang selalu memberikan segala hal yang tak aka nada habisnya sebagai penguasa alam semesta, tanpanya semua harapan ini akan menjadi sirna, tak ada kata lain yang mampu terucap selain kata syukur atas segala nikmat yang telah memberikan, terima kasih ya ALLAH dan terima kasih ya Rasulullah MUHAMMAD SAW.
- ❖ Untuk kedua orang tuaku Bapak Abdurrais dan Ibu Agustina yang telah membiayai kuliahku dan sebagai ucapan terima kasih, hormat dan baktiku karena sudah mendidik anakmu ini dengan kasih sayang dan penuh pengorbanan, sungguh karena dukungan dan do'a disetiap sujudmu sehingga anakmu dipermudah oleh Allah SWT dalam segala urusan, semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak.
- ❖ Bapak Ibu dosen yang telah menjejarkan ilmu kepada saya, teman-teman kelas Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, yang selalu ada dalam suka dan duka, tiada kata lain yang mampu terucap melainkan “terima kasih’.
- ❖ Untuk pacarku Maman yang telah banyak memberikan motivasi dan nasihat semoga Allah SWT selalu melindungimu dan dimudahkan dalam menyelesaikan skripsinya.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1). Di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dedy Iswanto, S.T., M.M. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP. sebagi Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berbagai saran dan kritikan sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
6. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberikan Do'a dan Motivasi serta Dukungan bagi peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman dekat dan rekan-rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dorongan Do'a serta Motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 29 November 2021

Penulis

Dita Nurfadillah
218130093

**EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
(STUDI KASUS DESA SONDOSIA KECAMATAN BOLO KABUPATEN
BIMA TAHUN 2020)**

Oleh : Dita Nurfadillah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020? dan Faktor Penghambat Evaluasi Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020?

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada situasi objek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrument kunci, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, ditunjang pula dengan studi dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, belum optimal karena adanya keluhan-keluhan mengenai pendataan nama-nama calon penerima BLT Desa. Namun yang menjadi kendala yang dihadapi adalah miskomunikasi antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Pelayanan, Bantuan Langsung Tunai.

**PERFORMANCE EVALUATION OF VILLAGE GOVERNMENT IN
CASH DIRECT ASSISTANCE (BLT) SERVICES
(CASE STUDY OF SONDOSIA VILLAGE, BOLO DISTRICT, BIMA
REGENCY, 2020)**

By: Dita Nurfadillah

ABSTRACT

This research aims to figure out how to evaluate the village government's performance in direct cash assistance (BLT) services in Sondosia Village, Bolo District, Bima Regency in 2020. Evaluation of Village Government Performance in BLT Services in Sondosia Village, Bolo District, Bima Regency in 2020 and Obstacles to the Evaluation of Government Performance in BLT Services in Sondosia Village, Bolo District, Bima Regency in 2020 are two of the topics examined. Qualitative research is used to examine natural object situations where the researcher is the crucial instrument, with data collection techniques through observation and interviews, also supported by documentation studies. The findings of this study show that due to concerns about the data collection of the names of BLT Village users, the evaluation of the village government's performance in delivering direct cash assistance (BLT) in Sondosia Village, Bolo District, Bima Regency, has not been optimal. However, a misunderstanding between the Village Government, BPD, and the Community posed a challenge.

Keywords: Evaluation, Performance, Service, Direct Cash Assistance.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PLAGIARISME.....	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7

1.4. Manfaat Penelitian.....	8
------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Konsep Evaluasi.....	13
2.3 Konsep Kinerja.....	18
2.4 Evaluasi Kinerja.....	23
2.5 Bantuan Langsung Tunai.....	25
2.6 Kerangka Berpikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu.....	34
3.3 Teknik Penentuan Informan/Narasumber.....	35
3.4 Fokus Penelitian.....	36
3.5 Sumber Data.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.8 Validitas Data.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sondosia.....	49
4.1.2 Visi-Misi.....	50
4.1.3 Struktur Organisasi Desa.....	52

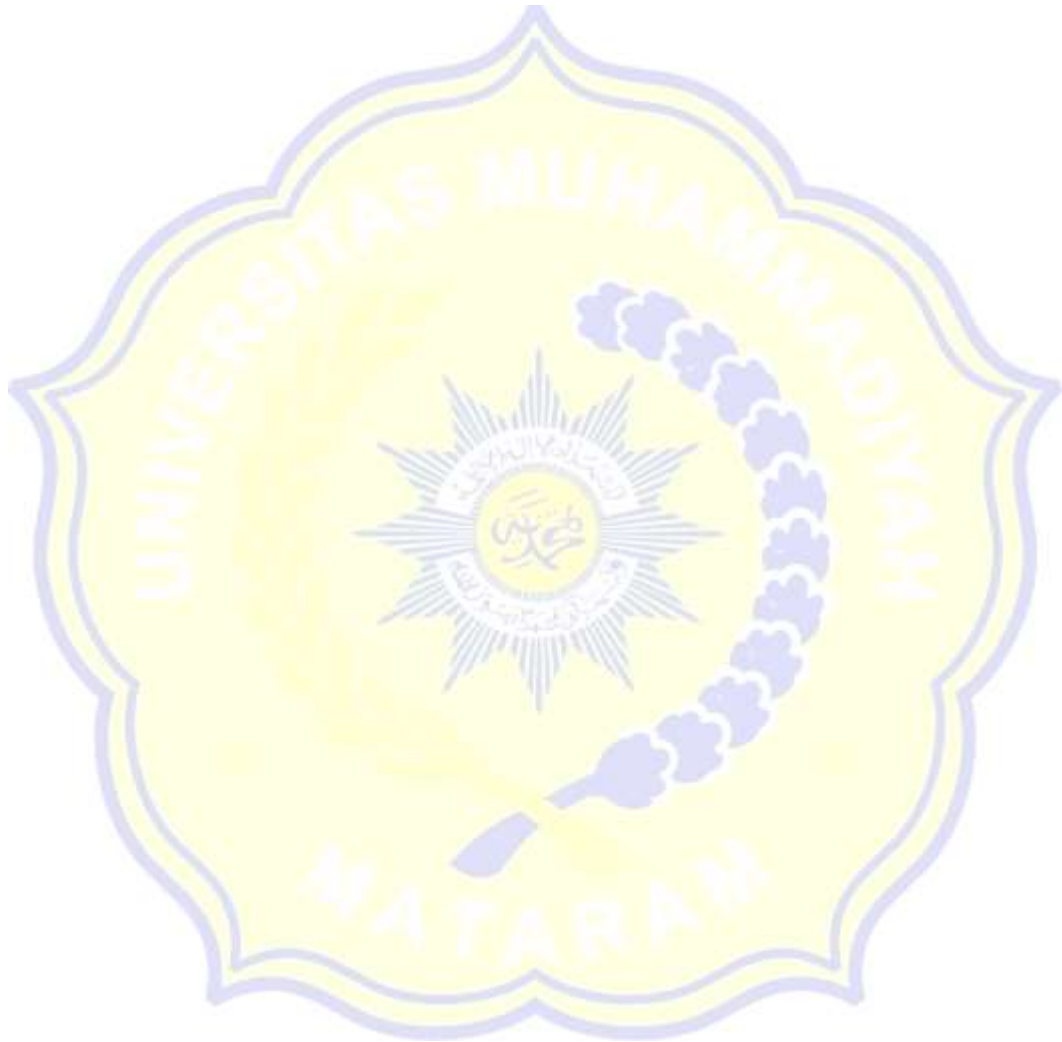
4.1.4 Profil Desa Sondosia.....	53
4.2 Pembahasan	
4.2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020.....	58
4.2.3 Faktor Penghambat Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020.....	74
BAB V KESIMPULA DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara.....	38
Tabel 3.2 Triangulasi Sumber Data.....	41
Tabel 3.3 Triangulasi Teori.....	45
Tabel 3.4 Triangulasi Metode.....	47
Tabel 4.1 Jumlah Rt dan Rw.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 4.4 Mata Pencaharian.....	56
Tabel 4.5 Sarana Dan Prasarana.....	58
Tabel 4.6 Pendidikan Petugas BLT.....	63
Tabel 4.7 Penerima BLT.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	62
Gambar 2.....	68
Gambar 3.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara ini yaitu untuk mengatur kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Serta tujuannya juga petunjuk untuk menata dan memelihara fasilitas negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan setiap negara ditentukan dimana daerah, awal bentuknya, serta dipengaruhi oleh yang berkuasa disuatu negara (Suharto, 2008: 23).

Indonesia ialah negara yang berkembang, hal ini disebabkan karena Indonesia masih kurang dalam SDM-nya. Beberapa hal yang dihadapi rakyat Indonesia yang masih belum baik pada segi politik maupun sosial, yaitu kemiskinan. Tahun 2014-2015, terjadi kemiskinan ditimbulkan beberapa faktor yaitu kesempatan peluang kerja kurang, tingkat pendidikan masih rendah, produktivitas lapangan kerja masih sedikit, distribusi pendapatan yang tidak merata, taraf upah sangat kurang, sampai politik yang belum stabil. Dari data kemiskinan tahun 2017, beberapa orang miskin di Indonesia di Tahun 2017 hampir mencapai 28,51 juta jiwa atau lebih kurang 11,13% (BPS, 2016: 5).

Berdasarkan data kemiskinan Provinsi NTB tahun 2020, membagikan jumlah penduduk sebanyak 5.125.622 orang, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 713.887 ribu jiwa (13,97%). Data penduduk Kabupaten Bima sejumlah 536.677 ribu jiwa asal 18 Kecamatan dan 191 Desa (Bimakab, 2021).

Evaluasi menurut KBBI merupakan suatu penilaian yang penilaiannya dari posisi struktur atau dari orang-orang dengan keahlian yang lebih rendah ke orang-orang yang berpangkat lebih tinggi atau lebih rendah. Evaluasi merupakan proses penilaian negatif maupun positif atau juga gabungan keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Simamora (2016) dalam Walelang S. (2020:2) memaparkan bahwa Kinerja (Performance) adalah pencapaian hasil kerja yang sinkron dengan standar dan hukum yang berlaku di masing-masing organisasi. Kinerja ialah suatu persyaratan eksklusif yang dapat langsung tercermin dari hasil yg dihasilkan baik darisegi kualitas maupun jumlahnya. Hasil yang didapatkan dapat berupa fisik ataupun nonfisik yang bisa diklaim berupa karya, yaitu suatu output baik berupa fisik/materil maupun nonfisik/nonmaterial. seseorang perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tupoksi dengan baik. Keberhasilan perangkat desa dalam memberikan pelayanan pada rakyat dipengaruhi oleh evaluasi terhadap kinerjanya. Pegawai Pemerintah masa sekarang tugasnya melayani masyarakat (Sally Walelang, 2020: 2).

Desa yang sebagai ujung tombak dari pemerintah adalah akronim dari pemerintah pusat yang bekerjasama langsung dengan masyarakat yang diharapkan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, sebagai pemerintah yang berada pada desa agar terwujudnya pembangunan disegala bidang. Pemerintah desa dibawah pimpinan Kepala Desa mempunyai tugas primer diantaranya: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan secara efisien dan bertanggung jawab, 2)

menyelenggarakan urusan pemerintah yang diberi wewenang oleh Bupati. oleh karena itu, pemerintah desa harus menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, serta ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum, serta pelatihan lembaga masyarakat. tetapi, yang terjadi ditingkat pemerintahan Desa justru banyak insiden-insiden yang berkaitan dengan rendahnya pelayanan publik oleh negara baik secara kualitas juga kuantitas (Lomempow, et.al., 2021: 2).

Kehadiran Covid -19 ini telah mendekonstruksi seluruh tatanan dan tata kehidupan masyarakat. Kemunduran ekonomi sebagai salah satu dampak negatif Covid-19 yang dihadapi Indonesia. Secara nasional, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -2,42% (q-to-q) pada triwulan I dibandingkan menggunakan triwulan IV 2019. Pertumbuhan Triwulan ke 2 sebanyak -4,19% (q-to-q) dibanding triwulan I. Sementara itu, Bila dibandingkan dengan triwulan ke 2 ditahun 2019, ekonomi Indonesia pada triwulan ke 2 tahun 2020 terkontraksi sebanyak -5,32% (y-on-y) (BPS, 2020) dalam Sally Walelang, (2020: 2).

Menyikapi dampak Covid-19 yang mengakibatkan lambatnya PEN, pemerintah mengambil kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” (Kementerian Keuangan RI, 2020). Kebijakan PEN diturunkan pada berbagai program seperti PKH, BPNT, Program Sembako, Bansos Tunai, Kartu PraKerja, BLT, Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, serta Diskon Listrik (Sally Walelang, 2020: 2).

Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan untuk masyarakat miskin yang berada dipedesaan yang bersumber dari Dana Desa. Besaran bantuan yg diterima sebesar Rp.600.000, perbulan/keluarga dari bulan april-juni. kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri Desa PPDT nomor 6 Tahun 2020 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PPDT nomor 11 Tahun 2019 perihal Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuan dari BLT ini yaitu untuk membantu warga miskin yang rentan secara sosial dan ekonomi supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi Covid-19.

Kemenristek juga membantu Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PPDT) untuk mengentaskan kemiskinan di desa melalui pengembangan program Desa Berinovasi. Melalui program ini pemerintah melakukan transfer teknologi pada warga desa agar bisa menaikkan manfaat produk inovasi desa, sebelum diproduksi secara luas ke semua negara. Selain itu, ada juga inovasi untuk membantu UMKM yg terdampak Covid-19, agar memberi nilai tambah sehingga menaikkan daya saing produknya hingga ke pasar dunia. Sesuai data Kemenristek, ada lebih kurang 1.307 usaha rintisan yang dibangun buat program pengembangan desa berinovasi (Sally Walelang, 2020: 2)

Transformasi terus dilakukan pemerintah agar bisa bertahan, pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19. Transformasi pula dibarengi dengan sejumlah kebijakan di penanganan Covid-19 serta PEN, diantaranya 3T (*Test, Tracing, serta Treatment*), program vaksinasi gratis, program jaring pengaman sosial, pemberian stimulus, dan lain-lain (Sally Walelang, 2020: 3).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut telah mulai membuahkan hasil. Sesuai rilis BPS, di triwulan III pertumbuhan Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya, berasal dari semulanya -5,32 persen menjadi -3,49 persen. Kinerja perdagangan Indonesia di bulan November 2020 mengalami kenaikan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Keberhasilan ini melanjutkan tren surplus yg sudah berlangsung sejak Mei 2020. pada bidang kesehatan, pemerintah pula berhasil mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Mari kita lanjutkan transformasi supaya Indonesia bisa cepat pulih serta keluar dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan observasi awal program BLT pada Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tidak tepat sasaran, terdapat beberapa fenomena persoalan yang terjadi terhadap kinerja Pemerintah Desa yang dilakukan belum maksimal. Hal ini ditandai dengan beberapa keluhan masyarakat di Desa Sondosia, dimana kinerja Pemerintah Desa dalam Pemberian tahapan BLT-DD sangat memakan waktu karena Pemerintah Desa Sondosia terlambat melakukan Musdes dalam mengurus BLT-DD, yang dimana pada segi administrasi masih terdapat masyarakat yg belum teregistrasi dalam BLT-DD padahal masyarakat tergolong masyarakat miskin.

Dalam hasil usulan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten 143 kk tersebut yang lolos dan diterima sebanyak 136 kk, hal ini tentunya yang memutuskan yaitu kepala Desa serta Perangkat Desa dalam menseleksi yang berhak menerima BLT (Sondosia-Bolo). Dalam

penyaluran BLT-DD tahap I di Desa Sondosia yaitu sebesar Rp. 81.600.000. Kemudian dalam tahap I Desa Sondosia menjadi desa terakhir yang melakukan pencairan BLT, itu karena terlambat melakukan Musdes (Musyawarah Desa).

BLT Dana Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021, Penyaluran Dana Desa untuk :

a. BLT Desa dibagikan setiap bulan secara pro rata total nilai penyaluran BLT-Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp. 300.000,- x 12 bulan.

b. Diluar BLT-Desa

- Desa Reguler : 3 Tahap
- Desa Mandiri : 2 Tahap

Desa sondosia dapat dikategorikan sebagai desa reguler, karena bantuan dikirim langsung dari pusat masuk ke rekening masyarakat yang menerima bantuan dan bukan termasuk kedalam BLT-DD melainkan diluar BLT-DD.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020**” dengan harapan memperkaya literatur, pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, untuk mengetahui gambaran lebih jelasnya maka penyusun dapat menyimpulkan dua hal yang menjadi focus permasalahan dalam penelitian ini yang berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020?
- 2) Apakah factor penghambat Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas mengenai uraian Rumusan Masalah diatas, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020.
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- Selain itu peneliti dapat memperluas cakrawala berpikir secara komprehensif dan dapat memahami berbagai ilmu terkait didalamnya tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
- Untuk mengembangkan kemampuan menalar, membentuk pola pikir dinamis dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmunya yang diperoleh dibangku perkuliahan.

1.4.3 Manfaat Akademik

- Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Objek dan Tekhnis Analisis	Hasil Penelitian
1	Marini, 2012	Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin	(Studi Kasus di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak)	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 responden yg akan mendapatkan BLT ini hanya 21 yang benar-benar berhak mendapatkan BLT dan 54 responden sisanya ialah responden yg tak berhak mendapatkan BLT. Ini mengakibatkan 54 responden ini memiliki beberapa hasil yakni total 21 responden. Manfaat BLT untuk warga miskin yaitu masyarakat miskin merasa disanjung para Pemerintah serta masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah menghargai mereka, tetapi mudaratnya BLT ini membuat rakyat miskin jadi malas, bisa disebabkan persoalan yg terjadi sesama warga.
2	Arif Munandar (2015)	Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (E-	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelaksanaan dilapangan terdapat

		KTP) di Kantor Camat Woha Kabupaten Bima		beberapa kekurangan yang dialami oleh pemerintah yaitu : kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh Pegawai Operator kepada masyarakat, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan woha kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Kecamatan Woha tentang pelaksanaan E-KTP.
3	Walelang (2020)	Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat di Desa Bentenan Satu	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	Hasil dari penelitian ini yaitu : Rendahnya produktivitas pada penyaluran BLT di desa Bentenan Satu disebabkan oleh rendahnya tanggung jawab kepala Desa sebagai penanggung jawab dan penentu penerima BLT, Rendahnya tanggung jawab kepala Desa sebagai pengambil keputusan dalam memilih serta validasi penerima dana BLT. Rendahnya akuntabilitas ini disebabkan oleh lemahnya integritas kepala Desa yang harus dilaksanakan sebagai seseorang kepala Desa, Rendahnya

				<p>responsivitas penanggung jawab (kepala Desa) penyaluran dana BLT juga bersumber pada tidak adanya kritik terbuka dari masyarakat desa serta aparat terkait lainnya atas penyimpangan penyaluran yang terjadi. ketiadaan kritik ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya Undang-Undang transparansi yang dimana memperjelas soal penggunaan anggaran pemerintah, Rendahnya responsibilitas dari kepala Desa menjadi penanggung jawab primer penyaluran BLT di desa Bentenan Satu ditimbulkan oleh tidak adanya permintaan pertanggungjawaban oleh masyarakat serta aparat desa terkait ketidaktepatan penyaluran BLT.</p>
4	Maun (2020)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas dari program BLT-Dana Desa Talaitad sudah tepat serta sesuai prosedur yg ada. Sedangkan pada ketepatan menetapkan pilihan, pemerintah desa telah bekerja sesuai dengan mekanisme, terkait adanya dugaan nepotisme dalam

				<p>mentukan penerima BLT-Dana Desa sudah dibantah oleh hukum tua serta sesuai hasil data sekunder lapangan menyatakan demikian. pemberian BLT-DD di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran sudah tepat sasaran. Hal itu didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT.</p>
5	Wowiling (2021)	<p>Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran BLT tidak sinkron dengan harapan atau tujuan yang ada, sebab bnyak rakyat yg ekonomi mampu namun mendapatkan BLT, artinya dinilai tidak layak. Hal itu terjadi sebab masyarakat dekat dengan aparat pemerintah ataupun pemerintah itu sendiri, sebagai akibatnya pemerintah tidak lagi mengutamakan kebutuhan masyarakat yang harusnya mendapatkan BLT apalagi warga yang benar-benar terdampak Covid-19. Dalam hal ini program BLT telah ditetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid-19 Terutama masyarakat yang kehilangan</p>

				pekerjaan dan ekonomi rendah.
--	--	--	--	-------------------------------

Sumber : Jurnal Nasional dan Skripsi Ummat

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada judul, sebagai salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh Wowiling dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang adalah untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima Tahun 2020. Perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi ataupun tempat dilakukannya penelitian serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian.

2.2 Konsep Evaluasi

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi dari Charles O. Jones dalam (Aprilia, 2009), ialah “Evaluasi is an activity wich can contribute greatly to the understanding and improve ement of policy development and implementation” yang berarti evaluasi adalah kegiatan yang bisa menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan juga bisa membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Evaluasi ini dapat menentukan apakah pelaksanaan suatu program sudah selaras dengan tujuan pokok dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan selanjutnya dsapat digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu

kebijakan atau kegiatan bisa dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dilarang kegiatannya.

William N. Dunn berpendapat bahwa: “Secara umum istilah evaluasi bisa disamakan menggunakan diagnosis (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) serta penilaian (*assessment*), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti khusus, evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:600).

Pendapat di atas menyebutkan bahwa evaluasi ialah hasil dari sebuah kebijakan dimana pada kenyataannya memiliki nilai dari hasil tujuan atau target kebijakan. Evaluasi kinerja merupakan bagian akhir dari suatu proses. Evaluasi kinerja membantu manajer untuk mengambil keputusan suatu kebijakan, nilai yang didapatkan dari evaluasi menghasilkan suatu kebijakan berguna bagi pelayanan publik.

Yusuf (2010) dalam Walelang S. (2020:7) menjelaskan bahwa evaluasi artinya suatu upaya untuk mengukur dan memprediksi nilai secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut akses sebagai umpan balik untuk perencanaan yang dimasa yang akan datang.

Konsep evaluasi yang dikenalkan stufflebeam yaitu model CIPP (Context, Input, Procces and Product), keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen serta proses sebuah program kegiatan.

1) Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Stufflebeam dan Shinkfield (1985:169-172) dalam M, darodjat, (2015). menyebutkan bahwa evaluasi konteks : *To assess the object's overall status, to identify its deficiencies, to identify the strengths at hand that could be used to remedy the deficiencies, to diagnose problems whose solution would improve the object's well-being, and in general, to characterize the program's environment. A context evaluation also is aimed at examining whether existing goals and priorities are attuned to the needs of whoever is supposed to be served.*

Inti kutipan Stufflebeam dan shinkfield adalah evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara holistik, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa masalah, serta memberikan solusinya, menguji apakah tujuan pada prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yg akan realisasikan.

2) Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Menurut Stufflebeam dan shinkfield (1985: 173) dalam M, Darodjat. Fokus utama evaluasi masukan ialah memilih cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan bisa membantu mengorganisasikan keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang dipilih, rencana dan strategi apa yang diambil untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi input terdiri dari : (1)

Sumber Daya Manusia (2) Sarana dan Peralatan Pendukung (3) Dana atau Anggaran, dan (4) Berbagai Prosedur dan Aturan yang Diperlukan.

3) Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985:137), dalam Darodjat D. Esensi dari evaluasi proses yaitu: Mengecek aplikasi perencanaan atau program. Tujuannya ialah untuk memberikan umpan balik antara manajer dengan karyawan tentang beberapa aktivitas program yang berjalan sinkron dengan jadwal, memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan panduan untuk memodifikasi planning supaya sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara terencana seberapa banyak yang terlibat pada aktivitas program dapat menerima serta menjalankan peran atau tanggung jawabnya. Senada dengan Stufflebeam & Shinkfield, Worthen & Sanders (1981 : 137), menyebutkan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan (1) do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage, (2) to provide information for programmed decisions, and (3) to maintain a record of the procedure as it occurs.

Evaluasi proses digunakan untuk memprediksi desain mekanisme atau rekomendasi implementasi selama fase implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program,

serta sebagai rekaman atau file prosedur yg telah terjadi. evaluasi proses mencakup koleksi serta penilaian yang sudah ditentukan serta diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.

4) Evaluasi Hasil (Product Evaluation)

Stufflebeam dan shinkfield (1985:176) dalam M, Darodjat (2015) merincikan bahwa tujuan dari Evaluasi Produk ialah : untuk mengukur, menafsirkan, serta menentukan seberapa sukses hasil program dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang dilayani. Sedangkan menurut Sax (1980 : 589), fungsi evaluasi hasil adalah “....to make decision regarding continuation, termination, or modification of program”. Jadi, fungsi evaluasi hasil yaitu untuk membantu membuat keputusan yang keberpihakan dengan kelanjutannya, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, dan apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Dari pengertian *product evaluation* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi produk adalah penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Data yg didapatkan akan menentukan apakah program dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan. model CIPP sekarang ini disempurnakan menggunakan satu komponen O, yang berarti outcome, sehingga menjadi model CIPPO. Jika model CIPP berhenti pada mengukur output, sedangkan CIPPO sampai pada

implementasi dari output (Deradjot dan Wahyudhiana M, Vol. XIV, 2015 : 7)

Dibandingkan dengan model-model evaluasi lain, model CIPP memiliki kelebihan diantaranya: lebih komprehensif, karena objek evaluasi bukan hanya pada hasil semata namun juga mencakup konteks, masukan (input), proses, juga hasil.

2.3 Konsep Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kata kinerja ialah terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh akademisi sebagai “penampilan”, “prestasi”, atau “hasil kerja” (Yeremias T. Keban, 2004:191). Secara etimologis, kinerja ialah sebuah istilah dari asal kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari Bahasa asing prestasi, bisa juga berarti hasil kerja. Jadi pengertian kinerja dalam organisasi ialah jawaban dari tujuan organisasi apakah sudah berhasil atau tidak (www.wikipedia.com). Tidak selaras dengan Bernardin serta Russel (1993) (dalam Yeremia T. Kerban, 2004:192) mengartikan kinerja sebagai “*the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period.*” Pada pengertian tersebut, penekanannya ialah pada pencatatan hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja tidak termasuk menilai karakteristik pribadi pegawai tetapi hanya mengacu di serangkaian hasil yg dicapai seseorang karyawan selama periode tertentu (Sally Walelang, 2020 : 4).

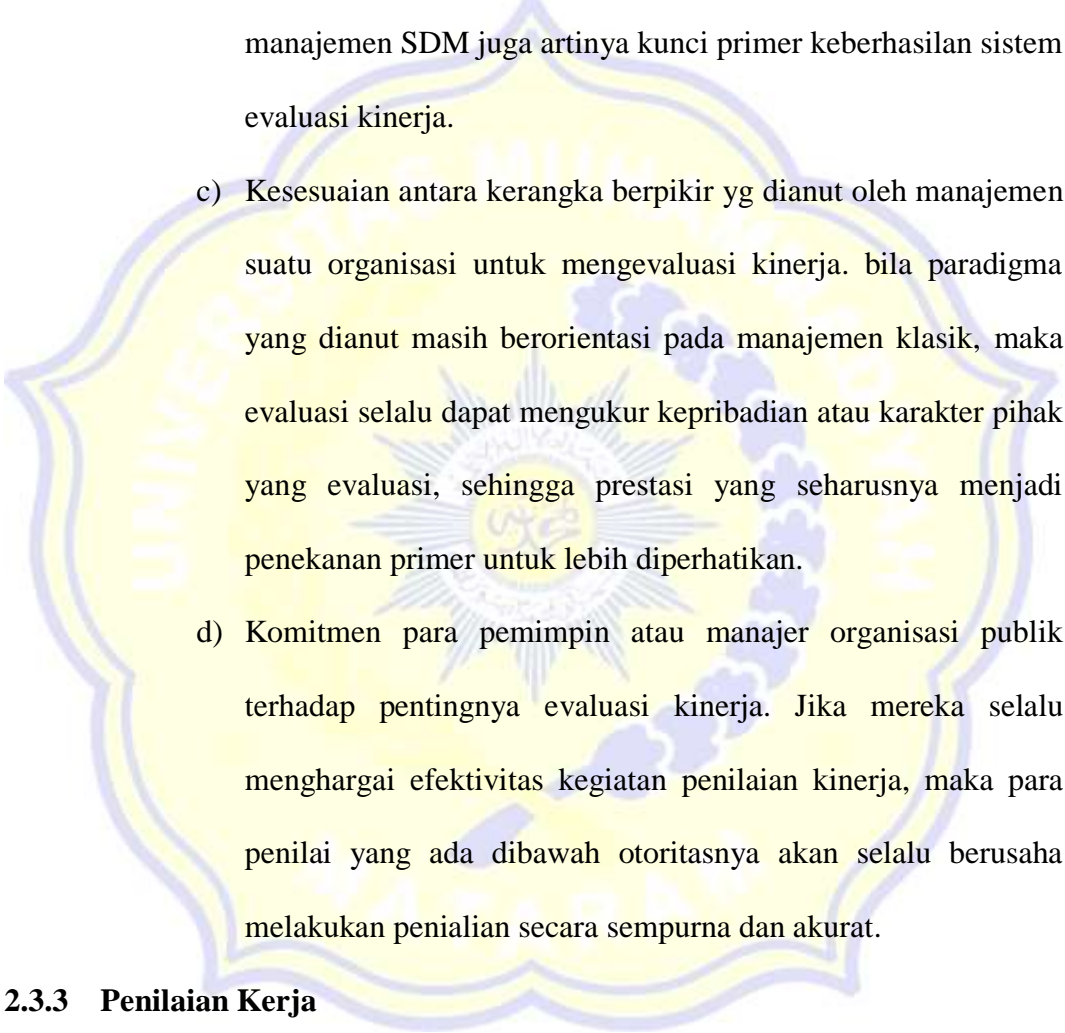
Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) dalam Walelang S. (2020) menjelaskan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yg dicapai oleh seorang atau sekelompok orang pada organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara sah, tidak melanggar aturan serta kode etik pekerjaan. Pendapat Bastian pada Hassel Nogi tadi, Encyclopedia of public Policy Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004:193), mengungkapkan kinerja bisa menyampaikan ilustrasi perihal seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja ialah hasil kerja atau suatu capaian dalam pekerjaan maupun program yang sudah direncanakan sebelumnya dan dilaksanakan selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi.

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Dalam Yeremias T. Keban (2004:2003) untuk melihat lebih dekat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut:

- a) Kejelasan persyaratan hukum untuk melakukan evaluasi secara tepat dan sempurna. pada kenyataannya, itu dinilai secara subyektif namun tak terdapat suatu aturan hukum yg mengendalikan dan mengatur perbuatan tersebut.

- 
- b) Manajemen SDM yang diterapkan mempunyai fungsi serta proses yg menentukan efektivitas evaluasi kinerja. aturan mainnya tentang siapa yang akan menilai, kriteria apa yang dipergunakan pada sistem evaluasi kinerja sebelumnya diatur dalam manajemen SDM tersebut. Dengan demikian manajemen SDM juga artinya kunci primer keberhasilan sistem evaluasi kinerja.
- c) Kesesuaian antara kerangka berpikir yg dianut oleh manajemen suatu organisasi untuk mengevaluasi kinerja. bila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka evaluasi selalu dapat mengukur kepribadian atau karakter pihak yang evaluasi, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi penekanan primer untuk lebih diperhatikan.
- d) Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya evaluasi kinerja. Jika mereka selalu menghargai efektivitas kegiatan penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penialian secara sempurna dan akurat.

2.3.3 Penilaian Kerja

Menurut Larry D. Stout dalam Hessel Nogi (2005:174) pengukuran atau penilaian kinerja organisasi ialah proses mencatat serta mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan pada arah pencapaian misi (*missiaon accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa

ataupun suatu proses. Tidak sama dengan pernyataan yang dikemukakan Bastian (2001) (dalam Hessel Nogi, 2005:173) bahwa dalam mengukur serta memanfaatkan evaluasi kinerja dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi serta akan memberikan feedback untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Untuk lebih jelas, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi yaitu:

- a) Memberikan pemahaman tentang pelaksana serta pengukuran yang digunakan untuk mencapainya,
- b) Memastikan rencana implementasi yang disepakati tercapai,
- c) Mengevaluasi serta memantau kinerja dengan membandingkan antara skema kerja dan pelaksanaannya,
- d) Memberikan penghargaan juga sanksi yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sinkron dengan system pengukuran yang sudah disepakati,
- e) Mengubahnya menjadi alat komunikasi antara bawahan serta manajer untuk meningkatkan kinerja organisasi,
- f) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi,
- g) Membantu proses aktivitas organisasi,
- h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan sudah dilakukan secara objektif,
- i) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan,
- j) Mengungkapkan konflik yang terjadi, evaluasi kinerja sangat penting untuk keberlanjutan pencapaian tujuan organisasi, maka

perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang digunakan secara tepat pada organisasi eksklusif.

Menurut Dwiyanto (2006:49) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, namun juga harus ditinjau dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, pertanggung jawaban dan responsivitas. Evaluasi kinerja dalam konsumsi jasa, misalnya kepuasan pengguna jasa menjadi sangat krusial sebab birokrasi publik juga timbul karena tujuan serta misi birokrasi publik acapkali bukan hanya mempunyai stakeholder yg banyak serta mempunyai kepentingan yg seringkali bertentangan satu sama lain, mengakibatkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, porsi kinerja organisasi publi dimata para stakeholder juga berbeda.

2.3.4 Indikator Kerja

McDonald dan Lawton (dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005:174) mengemukakan indikator kinerja diantaranya : Output oriented measures throughput, Efficiency, Effectivenss. Berikut penjelasan indikator tersebut antara lain:

- a. Efficiency atau efisiensi ialah suatu keadaan yg menunjukkan tercapainya perbandingan input dan output pada penyelenggaraan pelayanan publik.

- b. Effectiveness atau efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, baik dari segi tujuan/sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) mengemukakan indikator kinerja diantaranya: Economy, Efficiency, Effectiveness, Equity. Secara lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Economy atau ekonomis merupakan penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Efficiency atau efisiensi artinya keadaan yang paling mewakili perbandingan masukan dan keluaran pada kinerja pelayanan publik.
- c. Effectiveness atau efektivitas pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, baik dari segi tujuan/sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
- d. Equity atau keadilan merupakan pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

2.4 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja disebut juga "*Performance evaluation*" atau "*Performance appraisal*". Appraisal berasal dari kata latin "*appratiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja adalah memberikan nilai

atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja adalah cara paling adil untuk memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan oleh Leon C. Menggison (1981:310) dalam Lomempow, et al (2021: 5) penilaian prestasi kerja (*Performance Appraisal*) merupakan suatu proses yang dipergunakan atasan supaya bisa menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas serta akuntabilitasnya.

Sesuai pendapat diatas, maka evaluasi kinerja artinya sesuatu proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja aparatur untuk melihat apakah tanggung jawab pekerjaan sehari-hari apakah terjadi penurunan atau bahkan peningkatan sehingga pimpinan dapat menyampaikan suatu motivasi yang mendukung untuk memantau kinerja aparatur kedepannya. Selain itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi problem dan mencari solusinya.

Evaluasi kinerja dikemukakan oleh Payaman J. Simanjuntak dalam Lomempow, et al (2021) merupakan “suatu proses serta metode penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seorang atau sekelompok orang maupun unit-unit kerja pada suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan evaluasi kinerja merupakan penilaian sistematis yang bertujuan untuk mengetahui hasil pekerjaan pegawai dan kinerja organisasi. Selain itu, juga

dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang memadai, memberikan akuntabilitas yang sesuai pada pegawai sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa depan serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan kenaikan pangkat atau penentuan imbalan.

2.5 Konsep Bantuan Langsung Tunai

2.5.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Lagsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan uang pada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa supaya bisa mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa yaitu Rp.600.000 per bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria serta diberikan bulan april-juni Rp. 300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. (KOMPAK Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Desa, 2020 : 6).

KOMPAK Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Desa (2020 : 6) juga menambahkan Bila kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yg dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala Desa dapat mengusulkan penambahan alokasi Dana Desa bagi BLT pada Bupati/Wali Kota. Usulan ini wajib disertai alasan penambahan alokasi sinkron keputusan Musyawarah Desa khusus (Musdesus).

Program BLT ialah sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan dan alasan tertentu. Program ini timbul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai eksklusif, yg

bertujuan untuk memecahkan konflik masyarakat dengan menggunakan sumber daya yg tersedia. masalah publik yang dimaksud merupakan dilema kemiskinan.

Kemiskinan ialah masyarakat yang berada pada suatu keadaan dimana faktor-faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan, serta kondisi kehidupan lainnya sangat terbatas. program BLT-DD bertujuan untuk mempertahankan taraf konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai dampak adanya pandemi yang dampaknya dirasakan perekonomian masyarakat terutama msyarakat miski. Tujuan BLT ialah :

- 1) membentuk keluarga miskin agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan rakyat miskin karena kesulitan ekonomi.
- 3) menaikkan tanggung jawab sosial bersama..

Peran pemerintah disini sangat diharapkan terutama pada perekonomian. peran tersebut diharapkan menjadi peran positif, diantaranya kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan sosial dan pribadi, mempertahankan roda ekonomi pada jalur yang benar.

Dana desa yg dialihkan untuk BLT kurang lebih 31% dari total Rp72 Triliun, yaitu sebanyak Rp22,4 triliun. program BLT bagi 12,3 juta kepala

keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 diserahkan oleh kepala Desa serta Perangkat Desa.

Masing-masing akan menerima Rp.600.000 selama 3 bulan, yaitu April, Mei dan Juni sampai total menjadi Rp 1,8 juta. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

- 1) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp 800 juta, BLT dialokasikan 25%;
- 2) Desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 juta – Rp 1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30%;
- 3) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp 1,2 Miliar BLT dialokasikan 35% (<https://setkab.go.id/>).

2.5.2 Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Kompak Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Desa (2020: 6) menyebutkan dalam bukunya bahwa Calon Penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin yang memenuhi kriteria baik yg terdata pada DTKS sekalipun yg tidak terdata, diantaranya :

- a. tidak menerima bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja,
- b. Kehilangan mata pencaharian (tak mempunyai cadangan ekonomi yang relatif untuk bisa bertahan hidup selama 3 bulan kedepan),
- c. memiliki anggota keluarga yg rentan sakit menahun/kronis,

Tim pendata wajib memastikan kelompok rentan contohnya keluarga miskin, lansia, serta penyandang disabilitas

yang dikepalai perempuan terdata sebagai calon keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.5.3 Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Desa dapat memilih sendiri calon penerima BLT selama memenuhi kriteria yang ditetapkan, mengumpulkan data secara terbuka serta adil dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa bisa memakai data desa menjadi acuan, dan memakai DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, dan juga data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. apabila data penerima JPS tidak tersedia, maka desa bisa memakai data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial (KOMPAK Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendes, 2020:6).

Berikut ialah prosedur pendataan keluarga miskin serta rentan calon penerima BLT serta penetapan hasil pendataannya :

- a) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang meliputi profil penduduk sesuai usia, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan, serta disabilitas.
- b) kepala Desa membuat dan menyampaikan surat tugas pada Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 untuk mendata keluarga miskin calon penerima BLT.
- c) Jumlah pendata minimal tiga orang serta Jika lebih wajib berjumlah ganjil.

d) Melakukan pendataan ditingkat RT atau RW dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran-lampiran, atau ditingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan (KOMPAK Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Desa, 2020:6).

2.5.4 Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Relawan Desa serta atau Gugus Tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun serta melakukan verifikasi dan tabulasi data. pada proses verifikasi syarat penerima BLT, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima PKH serta BPNT ada di DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - b. keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima kartu tersebut bisa di dapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - c. Mengidentifikasi keluarga miskin serta rentan sebagai prioritas penerima BLT-Dana Desa.

d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT sesuai data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota (KOMPAK Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendes, 2020:6).

2. Relawan Desa dan atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin serta rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas sebagai prioritas/ tidak boleh terlewat

3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto serta mencantumkan lokasi kawasan tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

4. Jika ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat serta meneruskannya kepada Kasi Pemerintahan atau petugas khusus desa, untuk selanjutnya dibuatkan **Surat Keterangan Domisili**.

Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau

langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan administrasi penduduk.

5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada Kepala Desa.

2.5.5 Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

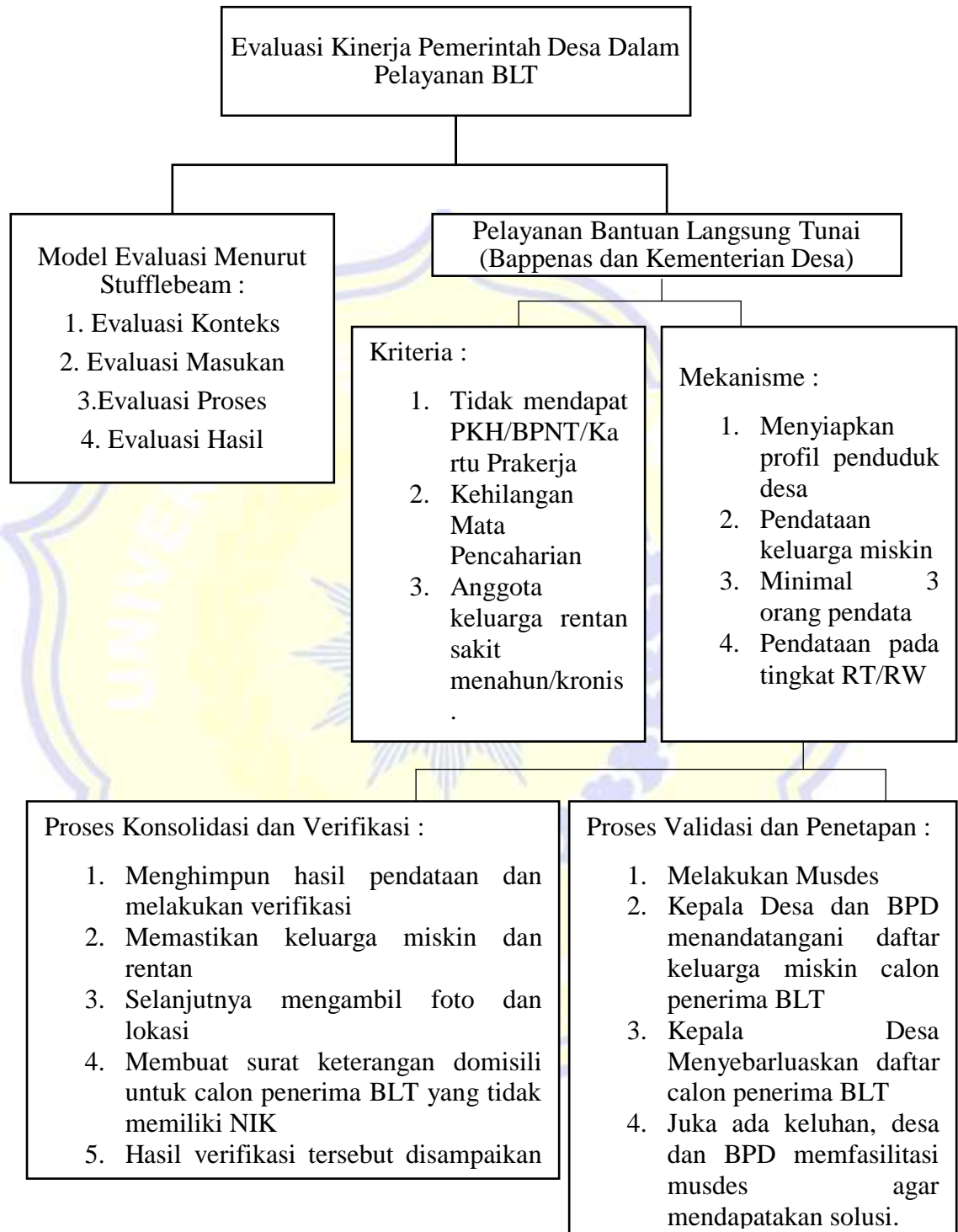
1. Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan Musdesus dari BPD dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan untuk membantu memverifikasi dan memvalidasi data terkait penentuan calon penerima BLT.
2. Berdasarkan hasil musyawarah, Kepala Desa serta BPD menandatangani daftar rumah tangga miskin calon penerima BLT. Merujuk pada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT yang telah diverifikasi kepada masyarakat, melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau dilokasi yang strategis serta mudah dijangkau. Desa juga dapat menggunakan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai sarana menginformasikan kepada publik.
4. Bila ada keluhan dari warga masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut serta menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota, atau bisa diwakilkan ke Camat.

Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT harus sudah disahkan.

Daftar calon penerima BLT-DD dilaporkan serta disahkan Bupati/Walikota, atau bisa diwakilkan ke Camat. untuk penyaluran bulan kedua, desa wajib memastikan bahwa data penerima BLT-DD harus telah diverifikasi.



2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan digunakan peneliti untuk merancang, melaksanakan, membuat data, dan ditarik kesimpulan untuk problem penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013) yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian ini mengkaji penyebab mengapa Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kajian dilakukan menggunakan Model Evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1985). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, undang-undang, dokumen-dokumen, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan BLT (Studi Kasus Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020). Data yang diperoleh dikaji dengan tahapan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah

dikarenakan penelitian tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan BLT belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, pemilihan Desa Sondosia Kecamatan Bolo sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut memudahkan peneliti untuk memperoleh data. Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari bulan Desember 2021 sampai 15 Januari 2022.

3.3 Teknik Penentuan Informan/Narasumber

Informan/Narasumber adalah orang yang di jadikan sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2010: 299). Menurut Sugiyono (2018) teknik untuk menetapkan responden dari penelitian ini yaitu:

1. Snowball Sampling

Teknik pengambilan sampel sumber data, secara bertahap berkembang dari sumber data yang awalnya kecil jumlahnya hingga menjadi besar. Hal ini karena jumlah sumber data yang sedikit itu belum bisa memberi data yang memuaskan, kemudian cari orang lain yang dapat dijadikan sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data yang akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding , lama-lama menjadi besar.

2. Purposive Sampling

Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. misalnya, seseorang diklaim paling memahami tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mengeksplorasi objek atau situasi social yang diteliti.

Sesuai hal diatas bisa disimpulkan bahwa ketentuan jenis sampel untuk penelitian ini digunakan *Snowball Sampling* dan *Purposive Sampling*. Subjek untuk penelitian ini yaitu:

- a) Masyarakat yang menerima BLT.
- b) Staf Desa Sondosia.

3.4 Fokus Penelitian

1. Evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020 terdiri dari 4 tahapan dari stufflebeam diantaranya: Evaluasi Konteks, Evaluasi Masukan, Evaluasi Proses dan Evaluasi Hasil.
2. Faktor penghambat evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020 menggunakan teori George C. Edward III diantaranya: SDM, Komunikasi, dan Disposisi.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Data Primer

Data primer ialah data yang memberikan langsung data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara

langsung dengan informan. hasil dari evaluasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kinerja pemerintah desa sondosia dalam menentukan kriteria penerima BLT belum efektif karena masih terdapat kekurangan dan masalah-masalah dalam pendataan BLT Desa. kurangnya responsivitas realisasi penyaluran BLT karena tidak adanya kritik terbuka dari masyarakat desa sehingga penyaluran belum sepenuhnya tepat sasaran.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengambilan dokumen atau data-data dari objek yang akan diteliti. dokumen dan data-data yang diperoleh yaitu data penerima BLT-Dana Desa tahun 2020 dan 2021, dan data profil Desa Sondosia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006: 198) adalah :

1. Wawancara

Jenis wawancara ini termasuk kategori *in-depth interview*, dimana pada pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah serta lebih transparan, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Untuk Staf Desa Sondosia	Pertanyaan Untuk Masyarakat Penerima BLT-DD
1	Sejauh mana tingkat ketepatan sasaran yang bisa dijamin oleh Bapak/Ibu dari realisasi penyaluran BLT-DD yang telah dilakukan.?	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya BLT-DD dimasa pandemi Covid-19.?
2	Bagaimana tahapan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.?	Sejauh mana efektivitas dan dampak yang Bapak/Ibu rasakan dengan adanya program BLT-DD.?
3	Sejauh mana efektivitas mekanisme penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima dilapangan.?	
4	Sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT Tahun 2020.?	
5	Apakah faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD Tahun 2020.?	

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 2021

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi memberikan gambaran rinci perihal kegiatan program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke lokasi kegiatan orang yang akan diamati, namun tidak berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sondosia tentang evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-Desa bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pendataan calon penerima BLT yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, masyarakat juga kurang memahami tentang adanya BLT

Desa karena pemerintah desa kurang dalam melakukan sosialisasi, dan hasil pendataan yang kurang transparan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah data yang berupa teks, dokumen maupun karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonversikan kedalam bentuk data).

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah selanjutnya Setelah mendapatkan data adalah menganalisis dan mengolah data yang terkumpul. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2005 : 248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, membaginya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang bisa diceritakan pada orang lain. Proses analisis data dilakukan menggunakan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan dituangkan kedalam laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting dicari dan disusun secara sistematis. aktivitas yang dilakukan selama tahap reduksi data ialah menentukan serta mensistensikan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penelitian harus diusahakan membuat matriks, grafik, jaringan, atau bisa juga dalam bentuk naratif ntuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian yang berbeda dari penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap *display data* ialah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara kedalam bentuk kalimat dan sajikan dalam pembahasan.

3. Mengambil Kesimpulan

Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama proses penelitian, dengan cara penambahan data baru, kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data ialah menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian (Moleong, 2005 : 249).

3.8 Validitas Data

Triangulasi menurut Moleong, 2005:330 merupakan teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan data diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data tersebut. tenik yang digunakan dalam triangulasi ini terdiri dari 3 yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Merupakan langkah pengecekan ulang data-data yang diperoleh dari informan dengan cara mempertanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya.

Tabel 3.2 Triangulasi Sumber Data

Pertanyaan Penelitian	Informan	
<p>Staf Desa:</p> <p>Sejauh mana tingkat ketepatan sasaran yang bisa dijamin dari realisasi penyaluran BLT-DD yang telah dilakukan</p>	<p>Informan 1</p> <p>Realisasi pada tahap I berjalan dengan lancar dengan ketepatan sasarnya sebesar 70%, karena bergantung pada anggaran dana desa. Terdapat sedikit kendala pada permasalahan NIK dan KK. Jumlah KPM pada tahap I tahun 2020 sebanyak 136 orang, tahap II dan III sebesar 60 orang.</p>	<p>Informan 2</p> <p>30% bersumber dari dana desa sudah tepat, pada tahun 2020 tersalurkan sebanyak 3 tahap. Kriteria penerima BLT-DD ini yaitu tidak mendapat bantuan social lainnya, kehilangan mata pencaharian dan anggota keluarga yang rentan sakit menahun</p>
	<p>Informan 3</p> <p>Untuk Penyaluran BLT-DD di Desa Sondosia sudah berjalan lancar dan tepat sasaran 50%. Penerima manfaat diutamakan yang terkena dampak Covid-19 karena dalam penyaluran BLT Desa harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, permasalahannya terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah</p>	<p>Informan 4</p> <p>Tingkat ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-DD sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi pada tahap I dan tahap II ada perbedaan atau pengurangan penerima BLT Desa yang awalnya 136 orang menjadi 60 orang.</p>

	menerima bantuan social lainnya	
Bagaimana tahapan pendataan dan penyaluran BLT-DD	<p>Informan 1</p> <p>Dalam tahapan pendataan dilakukan pada tingkat Rt/Rw kemudian baru ke desa, lalu melihat lagi data agar disesuaikan dengan ADD supaya bisa menentukan berapa orang yang tercover melalui kas daerah dan ditransfer ke rekening desa, dan untuk prosedur pendataan desa melakukan musdesus untuk menentukan penerima BLT.</p>	<p>Informan 2</p> <p>Dalam mekanisme pendataan dilakukan verifikasi di tingkat Rt/Rw di masing-masing wilayah dusun melalui tahapan Musdes oleh BPD yang dituangkan dalam berita acara untuk penetapan penerima BLT</p>
	<p>Infoman 3</p> <p>Dibentuk petugas BLT, kemudian melakukan pendataan dan Musdesus. Hasil musyawarah desa yang dilakukan, kemudian di verifikasi dan validasi data kemudian baru dilakukan penetapan penerima BLT-DD.</p>	<p>Informan 4</p> <p>Tahapan pendataan dilakukan sesuai dengan prosedur, dari tingkat Rt/Rw baru kemudian ke Desa, penyaluran BLT dilaksanakan di Kantor Desa Sondosia dengan mematuhi protocol kesehatan dan memakai masker.</p>
Sejauh mana efektivitas mekanisme penyaluran BLT-DD kepada penerima dilapangan.	<p>Informan 1</p> <p>Pada tahun 2020 BLT tersalurkan dengan lancar dan tepat sasaran, walaupun terjadi pengurangan penerima BLT dari awalnya 136 orang, pada tahap II dan ke III menjadi 60 orang saja. Dan pendidikan straf desa yang rata-rata tamatan SMA menjadi</p>	<p>Informan 2</p> <p>Berjalan sesuai dengan mekanisme, mulai dari pendataan, verifikasi, validasi/penetapan sudah efektif. Dan diawasi langsung oleh BPD.</p>

	<p>kendala karena belum mampu mengaplikasikan computer dan memverifikasi data dengan baik.</p>	
	<p>Informan 3</p> <p>Untuk pengambilan BLT Desa diwajibkan datang sendiri bagi nama yang sudah tertera dalam daftar penerima BLT, tidak bisa diwakilkan serta harus membawa kartu BLT dan KTP ataupun KK.</p>	<p>Informan 4</p> <p>Penyaluran BLT Desa berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan tempat pengambilan BLT dilaksanakan di kantor desa sondosia yang disediakan kursi, serta harus mematuhi protocol kesehatan.</p>
<p>Sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD tahun 2020.</p>	<p>Informan 1</p> <p>Pemerintah Desa membentuk pelaksana khusus yaitu gugus tugas Covid-19 yang diawasi oleh BPD. Setelah penyaluran, Pemerintah Desa memngevaluasi kembali yang berhak sepenuhnya sebgai KPM.</p>	<p>Informan 2</p> <p>BLT-DD tersalurkan dengan baik berdasarkan ketentuan dan mekanisme melalui tahapan yang sudah di tetapkan dan penerima BLT dilayangkan undangan untuk menerima BLT.</p>
	<p>Informan 3</p> <p>Pada tahap I penerima BLT sebanyak 136 orang mendapatkan Rp. 600.000, kemudian pada tahap II dan seterusnya sebesar Rp. 300.000 dengan jumlah KPM sebesar 60 orang. Pemerintah desa memfasilitasi ruang kantor desa sebagai tempat penyaluran BLT Desa dan melakukan evaluasi kembali</p>	<p>Informan 4</p> <p>Sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur, pemerintah desa semaksimal mungkin mengaupdate data penerima bantuan supaya terhindar dari adanya penerima bantuan ganda.</p>

	terhadap uang BLT yang disalurkan kepada penerima BLT.	
Faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD	<p>Informan 1</p> <p>Terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa dengan BPD sehingga menimbulkan persoalan dalam pendataan calon penerima bantuan, adanya indikasi politik antara staf desa dengan pihak pengurus BPD sehingga membuat perjanjian kontrak politik yang menjamin ketepatan sasaran dan keterlambatan pada penyaluran BLT Desa.</p>	<p>Informan 2</p> <p>Penerima manfaat sebagian kecil terkendala adminduk dan penerima manfaat perlu dijemput oleh karena aktivitas dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan.</p>
	<p>Informan 3</p> <p>Pendidikan dari staf desa dan petugas BLT yang rata-rata SMA sehingga belum mampu mengaplikasikan computer dan memverifikasi data dengan baik.</p>	<p>Informan 4</p> <p>Dalam penyaluran BLT juga harus dipastikan tidak ada pemotongan pembagian BLT-DD karena sudah ada dalam ketentuan Presiden RI.</p>
<p>Masyarakat BLT:</p> <p>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya BLT-DD di masa pandemi Covid-19.</p>	<p>Informan 1</p> <p>BLT-DD sangat membantu terutama masyarat miskin yang terdampak Covid-19 dan yang tidak memiliki penghasilan serta dapat membantu meringankan beban masyarakat.</p>	<p>Informan 2</p> <p>Sangat membantu masyarakat yang kepala keluarganya seorang perempuan yang harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dengan adanya bantuan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok.</p>
Sejauh mana efektivitas dan dampak yang	Informan 1	Informan 2

Bapak/Ibu rasakan dengan adanya program BLT-DD.	Sangat efektif sekali dengan adanya bantuan Rp. 600.000 karena bisa menggunakan bantuan ini untuk memulai modal usaha lagi yang sempat berhenti karena kurangnya modal akibat pandemi Covid-19.	Cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak cukup untuk keperluan selama 1 bulan.
---	---	---

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yaitu didasarkan pada asumsi bahwa fakta tidak bisa diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih, serta dapat dilaksanakan menggunakan penjelesan banding.

Tabel 3.3 Triangulasi Teori

Pertanyaan Penelitian	Hasil Penelitian	Teori
Sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD tahun 2020.	Kinerja Pemerintah Desa dalam pelayanan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Tahun 2020 meliputi : (1) Evaluasi Konteks yaitu kinerja pemerintah Desa Sondosia dalam menentukan kriteria penerima BLT di Desa Sondosia belum efektif, masih terdapat kekurangan dan masalah-masalah dalam pendataan BLT Desa. (2) Evaluasi Masukan, dimana Sumber Daya Manusianya di Desa Sondosia masih rendah (3) Evaluasi Proses,	Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985:169-172) dalam M, darodjat, (2015). Konsep evaluasi yang dikenalkan stufflebeam yaitu model CIPP (Context, Input, Procces and Product), keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen serta proses sebuah program kegiatan.

	<p>kurangnya reponsivitas realisasi penyaluran BLT, karena tidak adanya kritik terbuka dari masyarakat desa. (4) Evaluasi hasil, BLT-DD sangat membantu masyarakat ditengah pandemic Covid-19 tetapi belum sepenuhnya tepat sasaran.</p>	
<p>Faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD.</p>	<p>Faktor Penghambat Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan BLT di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Tahun 2020, terletak pada miskomunikasi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat sehingga proses pendataan awal tidak sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penyaluran BLT karena sering perubahan regulasi realisasi BLT. Selain itu, terkendala dalam adminduk sehingga pemerintah desa harus membuat Surat Keterangan Domisili.</p>	<p>Menurut teori George C. Edward III ada beberapa komponen penghambat kinerja yaitu : (1) Sumber Daya Manusia, (2) Komunikasi, (3) Disposisi.</p>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

3. Triangulasi Metode

adalah suatu metode yg melakukan pengecekan hasil penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang tidak selaras yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga derajat kepercayaan valid.

Tabel 3.4 Triangulasi Metode

<p>Pertanyaan Penelitian</p>	<p>Metode Pengumpulan Data</p>	
<p>Sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD Tahun 2020.</p>	<p>Wawancara</p> <p>BLT-DD tersalurkan dengan baik berdasarkan ketentuan dan mekanisme melalui tahapan yang sudah ditetapkan dan penerima BLT dilayangkan undangan untuk menerima BLT. Sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur, pemerintah desa semaksimal mungkin mengupdate data penerima bantuan supaya terhindar dari adanya penerima bantuan ganda.</p>	<p>Observasi</p> <p>Dari pengamatan peneliti kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD tahun 2020 belum terlaksana dengan baik karena peneliti melihat masih terdapat kekurangan yang dimana dalam tahapan pendataan belum efektif karena masih terdapat masyarakat yang menerima bantuan ganda, padahal masih terdapat masyarakat yang lebih memenuhi kriteria calon penerima BLT-DD</p> <p>Kurang transparansinya proses pendataan dan mekanisme penyaluran sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan adanya pengurangan penerima BLT-DD.</p>
<p>Faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelayanan BLT-DD.</p>	<p>Wawancara</p> <p>Terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa dengan BPD sehingga menimbulkan persoalan dalam pendataan calon penerima bantuan, adanya indikasi politik antara staf desa dengan</p>	<p>Observasi</p> <p>Faktor penghambat kinerja pemerintah desa dari pengamatan peneliti yaitu faktor internalnya dimana pemerintah desa kurang mengupdate data-data penerima bantuan sehingga masih banyak masyarakat yang</p>

	<p>pihak pengurus BPD sehingga membuat perjanjian kontrak politik yang menjamin ketepatan sasaran dan keterlambatan pada penyaluran BLT Desa. Penerima manfaat sebagian kecil terkendala adminduk dan penerima manfaat perlu dijemput oleh karena aktivitas dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan.</p>	<p>mendapatkan bantuan ganda. Ini juga berdampak pada pengurangan jumlah penerima bantuan yang akhirnya berdampak pada masyarakat.</p>
--	---	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

